

OVERVIEW HASIL PENGAWASAN APIP TAHUN 2024 DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Bandung, 18 Desember 2024

Oleh :

ATI HOEROWATI, S.H., M.Si., CFrA., CGCAE

PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



DASAR HUKUM

01 PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara

03 PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rpjpd Dan Rpjmd, Serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

04 KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

05 PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

06 PERGUB JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2023

Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020

TUGAS POKOK :

1. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat)

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. Pembinaan dan pengawasan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan dari masyarakat dan limpahan dari Pemerintah Pusat;
8. Penyelenggaraan koordinasi atas hasil pengawasan dengan aparat penegak hukum;
9. Penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal;
10. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH | 2024

INDIKATOR KINERJA DAERAH

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Target 2024 : **A** Capaian 2023: **A**

Nilai Evaluasi SAKIP
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Dimensi Evaluasi



TARGET 2024 :

A

CAPAIAN 2023 :

A

Indeks Survei
Penilaian Integritas
(SPI)



TARGET 2024 :

71.24 %

CAPAIAN 2023 :

69,60%

Opini BPK-RI
terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah
(LKPD) Provinsi Jawa Barat



TARGET 2024 :

WTP

CAPAIAN 2023 :

WTP

Tingkat maturitas
implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah



TARGET 2024 :

Level 3

CAPAIAN 2023 :

Level 4 (PM)

Persentase rekomendasi
hasil pemeriksaan APIP
internal dan eksternal
yang ditindaklanjuti



TARGET 2024 :

70%

CAPAIAN 2023 :

70,20%



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 2024

Keputusan Gubernur Nomor 057/Kep.5-Inspt/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

PKPT Berbasis Risiko ditetapkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan disusun dengan memedomani Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 057/Kep.13-Inspt/2024 sehingga menghasilkan area pengawasan sesuai prioritas dan risiko.



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 057/Kep.5-Inspt/2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun, perlu ditetapkan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PKPT Tahun 2024, meliputi:
1. Pedoman Umum PKPT Tahun 2024; dan
 2. PKPT Tahun 2024, berupa matriks kegiatan pembinaan dan pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PKPT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PKPT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BOY PRADI MACHMUDIN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN I
TAHUN 2024

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL		HP					JML TIM	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET	PENGAMPU
						RMP	RPL	JML (HARI)	WK PJ	PT	KT	AT	JUMLA H						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal																			
II. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
1.	Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Program & Kegiatan dalam RPD/IRKP 2024 Berisiko Tinggi	Audit Kinerja	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area pengawasan berupa Program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)										Rp 1.292.743.375,00		Mobil, Laptop, Printer, Scanner, alat uji sipil			
1a-IRB1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Audit Kinerja	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area Pengawasan dalam Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	I	Minggu I Oktober	Minggu IV Oktober	10	5	10	10	30	55	1	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner, alat uji sipil	Tinggi		Irban I

KEGIATAN PENGAWASAN 2024

Keputusan Gubernur Nomor 057/Kep.5-Inspt/2024

tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

KEGIATAN PRIORITAS

1. Reviu RPJMD;
2. Reviu RKPD;
3. Reviu RPD
4. Reviu RKA dan KUA PPAS
5. Reviu LKPD;
6. Reviu LKIP;
7. Reviu EPPD;
8. Reviu LPPD
9. Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Provinsi;
10. Reviu Penyerapan APBD dan Barjas;
11. Evaluasi SAKIP Provinsi;
12. Maturitas SPIP;
13. Evaluasi SAKIP Kab/Kota;
14. Pengawasan Kinerja;
15. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
16. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
17. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
18. Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
19. Reviu kecukupan anggaran dan SDM APIP Kab/kota
20. TLHP BPK; APIP, BPKP dan ITJEN

KEGIATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

1. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Investasi dan Pelayanan Publik
5. Penanganan Stunting
6. Pengawasan Akhir Masa Jabatan

KEGIATAN PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Evaluasi Pelayanan Publik;
3. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PD dan Pemerintah Kab/Kota;
4. Kerjasama Dengan APH;
5. Kemitraan dengan Satgas Saber Pungli;
6. Kemitraan dengan Kelompok Pegiat Antikorupsi.

KEGIATAN PENEGAKAN INTEGRITAS

1. Penanganan Pelaporan Gratifikasi;
2. Fasilitasi Implementasi RAD-PPK melalui Pencapaian MCP dan Stranas PK
3. Fasilitasi LHKPN
4. Pengelolaan *Whistleblowing System* & Benturan Kepentingan
5. Pembangunan Zona Integritas
6. Sosialisasi Antikorupsi untuk Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat

KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP / INSPEKTORAT

Upaya-upaya Perbaikan Kemampuan Inspektorat dalam Melaksanakan peran sebagai *Consulting & Assurance* (Inspektorat Provinsi Jawa Barat Sejak Tahun 2016 Sudah Mencapai Level 3 Untuk Kapabilitas APIP).

PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah
2. Efisiensi
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
4. Pengawasan Pengembalian Keruda dari kasus tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Linkrecht van gewijsde*)

TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN APIP 2024

INTERNAL

Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Pemeriksaan oleh eksternal Pemerintah Daerah yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal K/L lainnya. Sedangkan Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan tanggal **4 Desember 2024**. Rasio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal adalah sebagai berikut.

Rasio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP terhadap **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2017-2023)**

Total Rekomendasi

9.578

Total Kerugian Daerah

97.3 M

Selesai

74,55%

disetor

38.8 M

7.140 Rekomendasi

atau **39,86%**

Dalam Proses

17,00%

Sisa

58,6 M

1.644 Rekomendasi

Belum Ditindaklanjuti

8,84%

818 Rekomendasi

Rasio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP terhadap **Perangkat Daerah Provinsi (2011-2023)**

Total Rekomendasi

5.718

Total Kerugian Daerah

428,7 M

Selesai

94,77%

disetor

155 M

5.419 Rekomendasi

atau **36%**

Dalam Proses

3%

Sisa

272 M

173 Rekomendasi

Belum Ditindaklanjuti

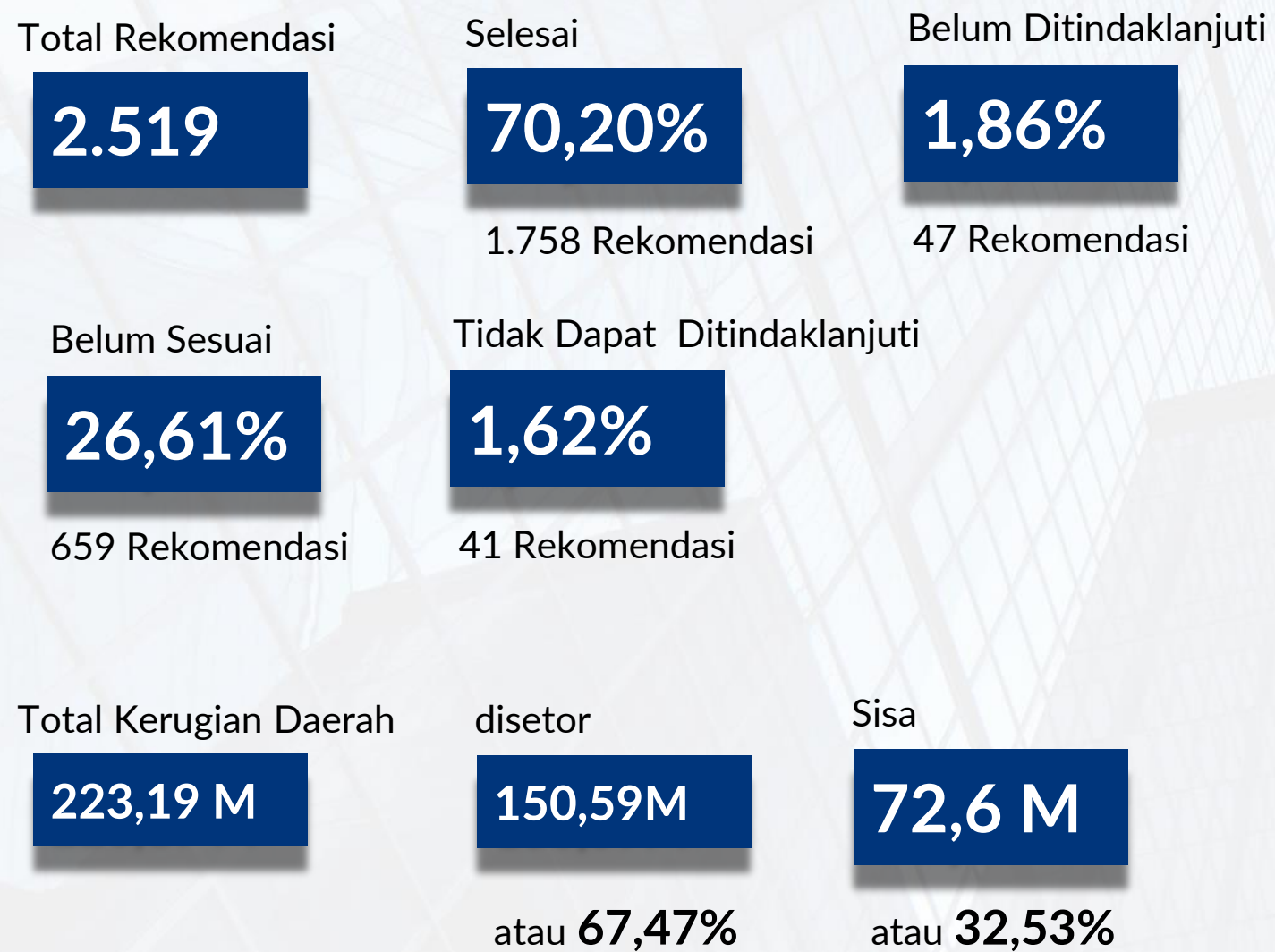
2%

115 Rekomendasi

TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN APIP 2024

Eksternal

RASIO PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI (2005-2024)



RASIO PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITJEN KEMENDAGRI DAN K/L LAINNYA.

ITJEN KEMENDAGRI

34 Rekomendasi

Selesai

100%

34 Rekomendasi

Belum Selesai

0%

0 Rekomendasi

ITJEN KEMENKES

148 Rekomendasi

Selesai

77,70%

115 Rekomendasi

Dalam proses

22,3%

33 Rekomendasi

ITJEN KEMENDIKBUD

1844 Rekomendasi

Selesai

100%

1844 Rekomendasi

Belum Ditindaklanjuti

0%

0 Rekomendasi

ITJEN Arsip Nasional RI

64 Rekomendasi

Selesai

93,5%

60 Rekomendasi

Belum Selesai

6,5%

4 Rekomendasi

ITJEN KEMENDES, ITJEN
BKKBN, ITJEN Perpustakaan
Nasional, ITJEN KKP dan
ITJEN KEMENDAG

Selesai

100%

REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 harus sesuai dengan tema rencana kerja yang tercantum dalam RKPD 2025.
2. Memperhatikan Asta Cita yang merupakan prioritas nasional tahun 2025.
3. Melakukan langkah kongkrit untuk peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan pemerintahan sehingga hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.
4. Menyusun program kerja berbasis risiko dengan memperhatikan prioritas daerah.

TERIMA KASIH



Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



www.Inspektorat.jabarprov.go.id

20
24